

SEKTOR RIIL DAN UMKM PASCA INPRES NO.6/2007

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Tanggal 12 Juni 2008 genap satu tahun pemerintah meluncurkan Inpres No.6/2007 tentang tentang Paket Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Boleh dikata Inpres ini merupakan paket kebijakan “jilid II” dari Paket Kebijakan serupa tahun lalu yang dituangkan dalam Inpres No. 3/2006, yang berisi serangkaian program dan tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Masalahnya, seberapa jauh implementasi paket kebijakan ini? Benarkah sektor riil dan UMKM mampu berkembang lebih cepat berkat paket ini?

Intinya Inpres No.6/2007 ini mencakup reformasi kebijakan, yang terdiri atas: Perbaikan Iklim Investasi, Reformasi Sektor Keuangan, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Pemberdayaan UMKM. Tiga kebijakan yang pertama merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu, sedangkan Pemberdayaan UMKM merupakan perluasan dari beberapa program yang pada tahun 2006 sudah ditampung dalam Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Inpres itu menugaskan Menko Bidang Perekonomian dan 19 Menteri lainnya, 3 Kepala LPND serta seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Untuk itu, setiap kebijakan yang ada dalam lampiran Inpres itu dirinci dalam bentuk program, tindakan, keluaran dan sasaran yang terukur dengan jelas, disertai target waktu.

Inpres ini secara eksplisit memerinci 141 tindakan dengan penanggung jawab 19 menteri di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian. Sampai akhir Maret 2008, ternyata hanya 107 tindakan yang selesai. Dengan kata lain, hanya 75,9% tindakan yang dinyatakan selesai, sisanya masih berlanjut atau belum tuntas.

Bagaimana dampak Inpres ini terhadap PDB, sektor riil dan UMKM? Dilihat dari kinerja ekonomi, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia belum bisa dikatakan termasuk *best performer*. Ini terlihat setidaknya dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia yang hanya menduduki peringkat 4 dari 8 negara Asean. Tahun 2007, PDB per kapita Indonesia sebesar US\$1.925 masih jauh dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh beberapa sektor kunci. Rekor paling tinggi berturut-turut adalah sektor pertanian (16,8%), sektor jasa-jasa (2,1%), sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan (1%), sektor perdagangan-hotel restoran (0,9%), dan sektor listrik-gas-air bersih (0,6%). Tingginya kenaikan sektor pertanian besar kemungkinan karena kuatnya pengaruh musim panen, sebagaimana tercermin dari kenaikan pada subsektor tanaman bahan makanan sebesar 56,1%. Data kuartalan selama tiga tahun terakhir menunjukkan besarnya fluktuasi pertumbuhan sektor pertanian yang berkisar antara negatif 21,7% hingga positif 19,6%. Namun, perlu dicatat, selama 2004-2006 sektor pertanian hanya menyumbang PDB sebesar 12-15%. Sejak tahun 1993 sumbangan sektor pertanian tidak pernah melebihi sektor industri

manufaktur. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya berperan 17,4% terhadap PDB.

Sumbangan sektor industri jauh lebih tinggi dibanding sektor pertanian. Selama 2004-2006, sektor industri menyumbang sekitar 27-28% terhadap PDB. Volatitas pertumbuhan sektor industri pun jauh lebih kecil dibanding sektor pertanian. Padahal sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1997. Selama tahun 2004-2007 industri hanya tumbuh sekitar 4,6 hingga 6,4%. Rekor ini masih jauh dari target pertumbuhan industri sebesar 8,6% hingga 2009. Dengan kata lain, paket kebijakan Inpres No.6/2007 belum mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor industri yang merupakan *leading sector* Indonesia pasca krisis.

Bagaimana dengan UMKM? Boleh dikata, UMKM merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan dengan skala UMKM mencapai sekitar 99% dari keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia. Sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 54-57%. Sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 96%. Reformasi UMKM masih “jalan di tempat” karena sektor ini menghadapi masalah menurunnya jumlah perusahaan dan penciptaan lapangan kerja, serta menghadapi banyak tantangan, yang tidak banyak disentuh oleh Inpres ini.

Apa tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia? Tantangan UMKM meliputi: Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Mayoritas UMKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).

Keempat, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalnyanya harga bahan baku, terbatasnya ketersediaan bahan baku, dan jarak yang relatif jauh. Penyebabnya karena bahan baku bagi UMKM yang berorientasi ekspor sebagian besar berasal dari luar daerah UMKM berlokasi. Para pengrajin topeng di Bobong, Gunung Kidul misalnya, mendatangkan bahan baku kayu pule dari Jawa Timur. UMKM penghasil tas dan kerajinan kulit di Jateng dan DIY ternyata mendatangkan bahan baku kulit dari Jawa Timur. Para pengrajin perak Kotagede juga mendatangkan bahan baku dari luar DIY. Naiknya harga kedelai dunia baru-baru ini terbukti membuat kocar kacir produsen tahu-tempe serta pedagang gorengan di seantero nusantara.

Kelima, masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampilnya tenaga kerja dan mahalnyanya biaya tenaga kerja. Regenerasi pengrajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.

Keenam, dalam bidang pemasaran, masalah pemasaran terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa

asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

Dalam konteks inilah, sektor riil dan UMKM agaknya membutuhkan reformasi yang mendasar, tidak bersifat karikatif. Mungkin berupa paket kebijakan yang lebih menyeluruh dari Inpres No.6/2007. Bila benar pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan baru di bawah Inpres No. 5/2008, perlu diprioritaskan hal penting berikut: Pertama, pemerintah perlu menetapkan *roadmap* kebijakan industri nasional sampai 2009, jangka menengah, hingga tahun 2030, dengan sasaran dan strategi yang rinci. Kedua, setelah *roadmap* kebijakan ditetapkan, perlu ditekankan pentingnya implementasi dan efektifitas pemantauan dari kebijakan. Ketiga, insentif perlu diberikan bagi industri yang merupakan “prioritas nasional” dan berbasis “kompetensi inti daerah”, baik berupa fasilitas pajak, kawasan khusus, kemudahan perijinan. Keempat, perlu rencana aksi yang jelas bagaimana menumbuhkembangkan industri komponen lokal, industri hilir di bidang agribisnis, dan industri rakyat yang hancur akibat bencana di berbagai daerah.

Dengan sisa waktu sekitar 1,3 tahun, mampukah Presiden SBY dan kabinetnya melakukan perubahan mendasar? Menggerakkan sektor riil, khususnya industri dan UMKM, perlu menjadi prioritas saat ini. Sudah saatnya berhenti menebar pesona, beralih menjadi menebar aksi.

-
- Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, <http://www.mudrajad.com>.